

**S M A R T**

Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu

26 Oktober 2022

**INFO LEGISLASI**

**BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Supporting the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**RESEARCH-BASED LEGISLATIVE POLICY MAKING**

**RUU TENTANG PERMUSEUMAN**



[pusatpuubk\\_dpr](#)



[Pusat PUU BK DPR RI](#)



[pusatpuubk\\_dpr](#)

26 Oktober 2022

## INFO LEGISLASI

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

### RUU TENTANG PERMUSEUMAN

RUU tentang Permuseuman merupakan RUU usul inisiatif DPR. Saat ini draf NA dan RUU tersebut sedang dalam tahap penyusunan di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Dalam rangka memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945, museum memiliki peran penting dalam melestarikan jejak sejarah kebudayaan/peradaban bangsa Indonesia sekaligus melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk mengkomunikasikannya kepada generasi masa kini dan masa depan. Namun, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permuseuman saat ini masih tersebar dan belum bersifat menyeluruh sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan komprehensif.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunan RUU tentang Permuseuman antara lain yaitu: a) Masih lemahnya manajemen pengelolaan museum sehingga pengelolaan museum belum terstandarisasi secara merata; b) Permasalahan kelembagaan yang berperan dalam pembinaan museum dikarenakan perubahan struktur organisasi di Kemendikbudristek pada tahun 2019; c) Kurangnya dukungan Pemerintah Pusat terutama dukungan anggaran terhadap museum yang dimiliki Pemerintah Daerah dan masyarakat; d) Sumber Daya Manusia museum di Indonesia belum memadai karena masih terbatasnya ketersediaan ahli di bidang terkait yang sangat spesifik; e) Sarana dan prasarana serta sistem keamanan museum kurang memadai; dan f) Masih rendahnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap museum.



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr

**S M A R T**  
Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu



26 Oktober 2022

## **INFO LEGISLASI**

**BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN  
PEMBANGUNAN**

**RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr

26 Oktober 2022

## INFO LEGISLASI

BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, DAN  
PEMBANGUNAN

### **RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan RUU usul inisiatif DPR. Saat ini RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sedang dalam tahap akan memasuki Pembicaraan Tingkat I.

Setelah berlaku selama 32 Tahun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu direvisi karena beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang lahir setelah undang-undang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya revisi UU tentang KSDAHE ini diharapkan sumber daya alam hayati Indonesia dapat lebih terlindungi mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan memiliki nilai yang sangat tinggi serta memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Adapun beberapa isu penting terkait dengan urgensi penyusunannya yaitu: a) Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE); b) Partisipasi masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi; c) Pendanaan dalam penyelenggaraan KSDAHE; dan d) Pemberatan sanksi pidana dan penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr

**S M A R T**

Sinergi Mahir Andal Responsif Tepat waktu



26 Oktober 2022

# INFO LEGISLASI

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM

## RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr

26 Oktober 2022

## INFO LEGISLASI

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAM

### RUU TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

RUU tentang Hukum Acara Perdata merupakan RUU usul inisiatif Pemerintah. Saat ini Draf NA dan RUU tersebut sedang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi III DPR RI. Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI juga turut serta dalam pembahasan RUU tersebut. Hukum acara perdata merupakan hukum formal yaitu hukum yang mengatur mengenai tata cara penegakan hukum materiel dalam hal ini hukum perdata.

Adapun isu krusial RUU tersebut antara lain: a) Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan; b) Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita; c) Penguatan jangka waktu baik dalam hal penyitaan, penyampaian memori kasasi dan pengiriman permohonan memori kasasi; dan d) Kepastian waktu pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan negeri dan kepada para pihak; dan e) Reformulasi dalam hal keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan.



pusatpuubk\_dpr



Pusat PUU BK DPR RI



pusatpuubk\_dpr